

**PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM MEMBINA PEREKONOMIAN
DESA DI DESA PANGKALAN NYIRIH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN
BENGKALIS**

**Oleh ;
Ngairi Fitria Ningsih**

Dibimbing oleh Dra. Ernawati. M,Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Adminiistrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 0761-63277

Lead the Countryside as existing Governance head in Countryside scope should be able to execute its duty in an optimal fashion, that goodness as society steward and also as medium which can give the solution to problem of arising out in society including area scope becoming tugasnya. Aspiration submitted/sent by society have to be heard by a Countryside head of so that/ to be what becoming target with can be reached is matching with the one which expected. But at field fact still there are a lot of poblems, this matter because of lack of duty execution lead the the countryside. Target of this research is to know the duty execution lead countryside in countryside of river Pangkalan Nyirih distric of rupert sub-province of bengkalis and also factor whai is resistor of duty execution lead countryside in countryside of river of pangkalan nyirih distict of bengkalis sub-province. To analyse the phenemenon in this research is writter use the theory Winardi with the indicator of right time exploiting, sum up the output, readiness to work along, quality of work. Metedologi used in this research research qualitative by using method of Purposive of Sampling. Result of this research show the duty Execution lead countryside in Countryside of River of Pangkalan Nyirih of District of Rupert of Bengkalis Sub-Provinci have been executed better. Adapaun factors found by is sumber daya human being, facilites and basic facilites.

Keyword : Duty Execution, Lead Countryside

PENDAHULUAN

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dan merupakan bagian internal yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Desa atau

sebutan lain dari kampung, nagari, subak, bori, marga dan lainnya mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan otonomi sehingga memerlukan demokratisasi, keadilan dan pemerataan. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota dan desa bukan

merupakan bagian dari perangkat daerah namun perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan Desa, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasannya. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan Desa, Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada camat.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 200 ayat (1) berbunyi: Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 202 ayat (1) berbunyi: Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dengan perangkat Desa. Pasal 206 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya Kepala Desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota kepada Desa disertai dengan

pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber manusia.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada Desa.

Melihat urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh Desa sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya Desa memiliki kewenangan yang cukup luas. Kepala Desa yang menurut undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan pemerintahan Desa yang sah menurut undang-undang, selain itu juga Kepala Desa memiliki tugas dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa Desa tersebut kearah yang dikehendaknya. UU No. 32 tahun tentang pemerintah daerah tersebut bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila melalui pelaksanaan otonomi daerah dan tidak terlepas juga pada Desa.

Selanjutnya pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 1 ayat 5 menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bertugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Peraturan pemerintahan No.72 tahun 2005 tentang Desa, juga menjelaskan tentang Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa yang mempunyai makna yang berbeda. Jika pemerintah Desa adalah badan atau lembaga atau organisasi tingkat Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan. Sedangkan Pemerintah Desa adalah kegiatan lembaga atau organisasi Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan kebijakan politik atau dengan kata lain aktivitas lembaga pemerintah Desa yang melaksanakan Perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Desa. Dalam PP. No.72 tahun 2005 Desa pada pasal 202 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dijelaskan pada PP. No.72 tahun 2005 pasal 14 sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang.

A. Membina Perekonomian Desa

Adapun Kepala Desa dalam membina perekonomian Desa adalah sebagai berikut;

1. Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD).
2. Kepala Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
3. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
4. Kepala Desa mampu mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian.

Dari sejumlah tugas Kepala Desa di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, penulis menemukan masih banyaknya tugas Kepala Desa yang belum dijalankan dengan baik, seperti :

- a. Menetapkan Peraturan Desa dalam pemberian bantuan kepada masyarakat adanya kecurangan orang dalam, seperti bantuan rumahbantuan yang semestinya

diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

- b. Kepala Desa kurang memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat Desa Pangkalan Nyirih.
- c. Kepala kurang bersosialisasi terhadap masyarakat Desa dalam membina perekonomian Desa di Desa Pangkalan Nyirih.
- d. Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa. Namun dalam kondisi rilnya Kepala Desa kurang memperdayakan masyarakat Desa Pangkalan Nyirih.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Perekonomian Desa Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam membina Perekonomian Desa Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
2. Apa sajakah faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam membina Perekonomian Desa Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Perekonomian Desa Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan rupa. Kabupaten Bengkalis.
 - b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

D. Konsep Teori

a. Organisasi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansakerta, desa yang artinya berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *'a group of houses and shop in a country area, smaller than town*. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan diluar Jawa seperti Sumatera Kalimantan, Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa Desa sangat beraneka ragam sesuai dengan asal mula terbentuknya area Desa tersebut, baik berdasarkan prinsip- prinsip ikatan. Pada perkembangannya desa memiliki peranan yang penting dalam organisasi Negara. Desa merupakan organisasi terkecil dari sebuah organisasi pemerintahan pada suatu Negara.

Stephen P. Robbins (2002:6) menyatakan organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif

berkesinambungan untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan. Sedangkan Selain itu **Dwight Waldo dalam Inu Kencana (2003:11)** yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan- kewenangan dan kebiasaan- kebiasaan dalam hubungan antar orang- orang pada suatu sistem administrasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa organisasi merupakan suatu hubungan kerjasama antara dua orang kelompok orang maupun masyarakat dalam suatu daerah dalam upaya mencapai suatu tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut tentunya melalui aktivitas- aktivitas yang sudah diatur dan direncanakan pada sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi organisasi yaitu:

1. Terjadi kerja sama dalam pembagian tugas dalam organisasi tersebut.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa organisasi pemerintah atau organisasi Negara berbeda dengan organisasi yang lainnya, hal ini ditandai dengan adanya kekuasaan atau hak Negara terhadap warganya untuk menuruti peraturan yang ada. Dalam pengertian tersebut diatas juga Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan warganya, bahkan jika perlu Negara dapat mengambil hak warganya.

Jika dikaji kembali, Desa dapat dikatakan suatu organisasi karena memiliki unsur- unsur organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi memerlukan serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesenjangan dan koordinasi yang bersasaran.
2. Organisasi merupakan kesimpulan orang-orang.

3. Organisasi memerlukan komunikasi, dalam hal ini ditekankan pada sasaran peranan seseorang dalam organisasi, terdapat orang-orang yang mengambil keputusan dan orang-orang yang diberi informasi atau motivasi.

a. Pemimpin

Hasibuan (2000:93) pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya Kartono (2006:95) mengatakan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Kartono (2006:33) fungsi kepemimpinan ialah memadu, menuntun, membimbing, membangun, member atau membangunkan motivasi- motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervice/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Menurut Kartono (2006:33) pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan- kecakapan disuatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama- sama melakukan aktivitas- aktivitas tertentu demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pemimpin merupakan pribadi, individu, seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk memimpin yakni dengan mempengaruhi serta mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai seorang pemimpin, harus dapat menjalankan tugas kepemimpinan.

Nitisemito (1993:146)

Kepemimpinan adalah bakat dan sifat- sifat tertentu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang menjabat sebagai pemimpin. Selanjutnya **menurut Rivai (2007:3)** Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarah dan mempengaruhi aktivitas-aktivitasnya yang ada hubungannya dengan pekejaan para anggota kelompok, tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berada untuk mempengaruhi tingkahlaku pengikutnya melalui berbagai cara.

Dalam Rivai (2007:8) ada beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu:

1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya.
2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan.
3. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu.
4. Kepemimpinan biasa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu.
5. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya.

Dalam hal ini di jelaskan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses Desa harus dapat memimpinkan desa tersebut. pengaruh dan mempengaruhi ada yang memengaruhi dan yang di pengaruhi. Sedangkan **Ndaha, 2003:216)**

Kepemimpinan adalah gejala sosial, kemampuan seorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integratif. Selanjutnya menurut **Thoha (2007:36)** Kepemimpinan adalah salah satu unsur dalam kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Sedangkan **Effendi (1997:74)** mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai suatu proses atau tindakan untuk mempengaruhi kegiatan- kegiatan suatu kelompok yang terorganisir dalam upaya menuju penataan dan pencapaian tujuan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dan kemampuan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, menjalankan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi melalui teknik- teknik atau kecakapan tertentu sehingga dapat mendatangkan keinginan orang lain untuk mengikutikeinginannya yang dilandasi pada kematangan intelektual yang tinggi dan emosional yang rasional serta memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut.

Menurut Kartono (2006:21)

1. Memiliki Kekuasaan
Kekuasaan disini yaitu berupa otoritas atau legalitas yang diberikan wewenang kepada pemimpin dalam satu kelompok.
2. Berwibawa
Yaitu kelebihan atau keunggulan yang dimiliki seorang yang membuat orang lain bersedia melakukan tugas.
3. Kemampuan

Yaitu kemampuan, kecakapan yang dianggap melebihi anggota kelompok lainnya.

B. Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa

Menurut **Soejadi (1986:13)** pelaksanaan tugas yang baik adalah:

1. Menghindari terjadinya pemborosan di dalam pendayagunaan faktor- faktor tenaga kerja, material, waktu, tahap pekerjaan, dan sebagainya.
2. Menghindari kemacetan- kemacetan dan kesimpangsiaran, sehingga terciptanya efektivitas tugas dalam proses pencapaian tujuan.
3. Menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang tepat sehingga kesederhanaan pekerjaan dapat dilaksanakan.

Selain itu **Moekijat (1996:12)** pelaksanaan tugas adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan tiap pegawai. Adapun **Agus Dharma (1995:9)** mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan **Mohammad As'ad (2000:65)** pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat di bagi menjadi:

1. Kualitas pelayanan.
2. Kuantitas pelayanan.
3. Waktu pelayanan.
4. Jabatan yang dipegang.
5. Absensi kerja.
6. Keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.

Selain itu **Winardi (1999:75)** mengatakan ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu:

1. Pemanfaatan waktu yang cepat.

Pekerjaan atau tugas yang dilakukan haruslah mempunyai langkah-langkah yang harus dijalankan agar tugas yang dilakukan bisa mendatangkan hasil yang ingin dicapai guna untuk mendapatkan metode yang cocok dalam memanfaatkan waktu dalam suatu kepemimpinan pelaksanaan tugas tersebut.

2. Jumlah output.

Dalam hal ini jumlah output pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia mengaju pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah capai, serta ukuran berhasil tidaknya satu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

3. Kesiediaan untuk bekerjasama.

Dalam sebuah organisasi haruslah ada kerjasama antara atasan dengan bawahannya agar mendapat kinerja yang baik. Hal ini akan dilihat dari adanya kerjasama antara pimpinan dan sesama pimpinan, dan pimpinan dengan bawahannya.

4. Kualitas pekerjaan

Segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau hasil kerja yang diperoleh hal ini dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, kelengkapan yaitu dapat dilihat dari adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Sedang kerapian dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa besar atau hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan

tugas yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa diberikan kewenangan dalam rangka terlaksananya tugas tersebut.

Selain itu **Talizuduhu (1990:20)** memberikan pengertian dari beberapa tugas Kepala Desa diantaranya yaitu menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Berhubung Kepala Desa serta perangkat desa menjadi penentu kebijakan dan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan pemerintahan desa dituntut untuk mempunyai kemampuan dan berperaan aktif dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan wewenangnya. Kewenangan tersebut diantaranya, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan bersama BPD. **Haw Wijaja (2003:31)** mengatakan bahwa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala Desa dapat mengkoordinir seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa dikatakan berhasil apabila kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan. Dengan dilaksanakan tugas kepala Kepala Desa dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan benar- benar dapat merasakan keberadaan Kepala Desa yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan pendapat **Inu Kencana (2003:27)** bahwa pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, sebagaimana kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah Desa yaitu mendapatkan pelayanan yang layak.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan secara partisipatif, tentunya harus melibatkan masyarakat itu sendiri pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan harus didukung oleh masyarakat itu sendiri.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Penulis melakukan penelitian di Desa tersebut dengan alasan karena di Desa tersebut terindikasi bermasalah pada pelaksanaan tugas Kepala Desa oleh Kepala Desa.

2. Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu orang yang dianggap mengerti permasalahan yang dibahas. Dalam menentukan informan penulis menggunakan metode sampling purposive yaitu suatu metode pengambilan sampel melalui pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, yang menjadi informan meliputi Staf desa, Sekretaris Desa, ketua BPD dan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik:

1, Observasi

Yakni penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan atau pemotretan secara cermat dan sistematis. Data yang diperoleh penulis melalui observasi, yaitu berupa foto atau gambar

semenisasi jalan desa, Kantor Kepala Desa, serta aktivitas masyarakat Desa.

2, Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan bahasa yang dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari, hal ini penulis melalui wawancara ini yaitu informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan melakukan pencatatan.

4. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti, dan hal ini sebagai buktipendukung penulis dalam melakukan penelitian.

a. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer didapat dari penelitian langsung dilapangan yaitu dengan cara wawancara kepada informan dan pengamatan terhadap kegiatan- kegiatan pemerintahan yang berada di dalam lingkungan desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari telaah pustaka serta pihak yang berkaitan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna melengkapi data yang ada. Data tersebut berupa foto atau potret lokasi penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu penganalisaan dengan cara mengumpulkan data yang ada diperoleh

dilapangan dan kemudian data tersebut dianalisa dan ditelaah dalam tanpa menggunakan perhitungan- perhitungan angka melainkan dianalisa dengan cara pemikiran yang logis berdasarkan teori-teori, data lapangan, pendapat serta pernyataan- pernyataan yang mendukung penganalisaan penelitian ini. Pada penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan yaitu teknik triangulasi, yaitu pengecekan atau membandingkan informasi suatu informasi dengan informasi lainnya dengan sumber yang berbeda dan ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Perekonomian Desa di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanegaraman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahn Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Pemusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sangkerta dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan

sebagai unit Pemerintahan Kelurahan yang berada di dalam daerah Kabupaten dan atau Kota.

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dituntut untuk dapat melaksanakan pelaksanaan secara efektif pada setiap aktivitas Pemerintahan Desa sehingga diharapkan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan Kepala Desa sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Oleh karen itu, dalam melihat sejauh mana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas- tugasnya pada uraian berikut dapat dijelaskan lebih lengkap.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang ini seorang Kepala Desa hendaknya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pemerintahan dan segala lapisan masyarakat Desa yang ada di Desa karena tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu akan mengalami kendala dan permasalahan.

1. Pemanfaatan Waktu Yang Tepat

Memanfaatkan waktu yang tepat itu adalah tuntutan, memanfaatkan waktu yang tepat pada waktunya merupakan salah satu contoh bentuk tanggung jawab kepada diri kita sendiri dan juga orang lain yang ada disekitar kita. Ketepatan waktu pencapaian sarana dan penyelesaian kegiatan, apabila pencapaian sasaran dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu atau dapat dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan.

Waktu adalah uang, itulah mampu mengelola waktu sebaiknya mungkin maka uang pun akan datang dengan sendirinya,

sebaliknya jika kita tidak mampu mengelola uang waktu dengan baik, maka uang pun tidak akan kita peroleh.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Untuk saat ini selaku Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Disini saya apabila kami mengadakan kegiatan apapun itu, kami sudah merencangkannya terlebih dahulu guna agar waktu yang kami targetkan sesuai dengan yang diniatkan, dengan menyusun kegiatan, dan petunjuk teknis sesuai dengan mekanisme dengan peraturan yang berlaku”. **(Hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Pangkalan Nyirih April 2015), tanggal 22 April 2015).**

“Kalau menurut saya pelayanan yang diberikan Kantor Desa itu sudah baik, karena selama aku mengurus surat menyurat dan lain-lainnya yang berurusan dengan Pemerintahan cukup baik, waktunya juga tidak begitu lama-lama, Cuma saja kendala yang ada di Kantor Desa ini cukup jauh dari perkampungan sehingga kurangnya minat masyarakat berurusan di Kantor Desa ini”. **(Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pangkalan Nyirih, tanggal 24 April 2015).**

Dari hasil Wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Desa ini telah memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desanya. Dan juga Aparat Pemerintahnya telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik untuk melayani apapun urusan masyarakatnya di kantor Desa tersebut, dengan menyelesaikan pekerjaannya di hari itu juga agar urusan masyarakatnya tidak ada kendala lagi di Pemerintah Desa.

2. Jumlah Output

Jumlah Output merupakan berapa hasil yang telah di capai oleh seseorang dalam mengetahui apa-apa saja hasil yang diperoleh oleh seseorang dalam sebuah tujuan baik individu maupun kelompok orang, dan juga dalam produksi, kita sering dihadapkan dengan beberapa perhitungan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja dan jumlah waktu kerja untuk mendapatkan output yang di inginkan agar mencapai Produktivitas yang telah ditentukan.

Adapun hasil wawancara dari informan penelitian sebagai berikut:

“Semasa Bapak itu menjadi Kepala Desa, tidak begitu banyak hasil yang diberikan Kepala Desa, ntah karena saya tidak begitu mengetahuinya ya. Akan tetapi selama jabatan begitu saja Desa ini”. **(Hasil Wawancara dengan masyarakat Desa Pangkalan Nyirih, tanggal 24 Mei 2015).**

“Menurut saya si kak, saya kurang mengetahui juga apa aja hasil yang telah di dapat oleh Kepala Desa ini, kare setau saya juga tidak ada yang berubah juga, Cuma dalam melaksanakan kegiatan Kepala Desa ini cukup mantap dalam mencari dana, karena mungkin banyak teman-teman diluar sana mungkin kak. (Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Pangkalan Nyirih, tanggal 24 Mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas jumlah hasil yang diberikan Kepala Desa selama menjadi Kepala Desa tidak seberapa, ntah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Desa, yang jelas hasil masa jabatan Kepala Desa ini yang dilihat oleh masyarakat tidak begitu banyak. Padahal seharusnya apapun kegiatan bisa juga dilakukan dengan cara perbaikan jalan

yang rusak, gotong royong dan lain-lainnya lagi.

3. Kesiediaan Untuk Bekerjasama

Kesiediaan untuk bekerjasama merupakan mampu bekerjasama dengan sesama Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Dan juga bekerjasama merupakan proses beregu (kelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“Untuk saat ini apapun yang kami lakukan dalam hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, saya selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu, agar bisa bekerja sama dengan melibatkan pihak tokoh masyarakat dan lembaga yang ada di Desa”. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa, tanggal 23 Mei 2015).

Hal ini di ungkapkan oleh informan penelitian berikut :

“Dalam kesiediaan bekerjasama ini, menurut Bapak ya Kepala Desa mampu kok bekerja sama dengan kami, malahan apapun yang kami lakukan dengan perintahnya Kepala Desa selalu turun tangan, seperti kegiatan gotong royong dan juga hal pembangunan, keamanan Desa”. (Wawancara dengan BPD, tanggal 23 Mei 2015).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa Kepala Desa Pangkalan Nyirih dalam melakukan apapun yang berurusan dengan Pemerintahan Desa selalu mengadakan Kerjasama bersama Aparat Pemerintahn Desa dan juga masyarakat.

4. Kualitas Pekerjaan

Kualitas Pekerjaan merupakan suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau yang dilaksanakn seseorang atas tugas- tugasnya. Intinya dari kualitas pekerjaan adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan.

Berikut hasil wawancara dengan informan :

“Selama ini Kepala Desa dalam meningkatkan kualitas pekerjaan saya sering memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Desa seperti dengn cara menunjang fasilitas Aparatur Desa, mampu mensejahterakan Aparat Pemerintah Desa, dengan sesuai pokok- pokok dan fungsi Aparatur Desaa dan dengan hak kewajiban serta meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis”.(Wawancara dengan sekretaris Desa Pangkalan Nyirih, tanggal 23 Mei 2015).

Hal ini dilanjutkkan wawancara dengan KAUR Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih :

“Dalam hal fasilitas dan sarana kerja kami memang belum memadai, akan tetapi walaupun demikian kami tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik walaupun msih kurangnya fasilitas kerja”. (Wawancara dengan salah satu Aparat Pemerintah Desa Pngkalan Nyirih, tanggal 23 Mei 2015).

Jadi dari hasil wawancara diatas kualitas pekerjaan Kepala Desa dan maupun Aparat Desa telah sangat baik, walaupun masih kurangnya fasilitas yang ada di kantor Desa itu, akan tetapi kualitas yang

diberikannya sangat sudah memuaskan masyarakat Desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dharma. 1995. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta

As'ad, Moh.,2000. *Psikologi Industri. (Edisi IV)*. Yogyakarta : Liberty.

Cohen Cornel. 1997 *RudalDevermen Participation*. Jakarta : Untu Press.

Efendi,1997, *Human Relation dan Public Relation Dalam Manajemen*, Bandung : Penerbit Mandiri Maju.

Fremont E Kast. Dan James E. Rosen Zweig 2002. *Organisasi dan Manajemen 1 Edisi Keempat*. Jakarta :Bumi Aksara.

Hasibuan. 2000..*Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kartono Kartini 2006, *Pimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Gravindo Persada,

Karyadi, 1998, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta,

Moekijat. 1996, *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Mandar Maju.

Mubyarto, 2000,*Partisipasi Sosial Dalam Pembangunan*. Jakarta: Lp3es.

Munasef, 1984, *Kepegawaian Indoneseia*, Bndung : Alumni.

Nasution,Mulia, 2000. *Manajemen Personalialia Aplikasi Dalam Perusahaan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Nitisemito Alex S, 1993, *Manajemen Personalialia*, Jakarta : Ghalialia Indonesia.

R. D. Agarwal 1992, *Seni Kepemimpinan Dalam Organisasi* Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.

Robbin, Stephen, P, atel., 2002, *Perilaku Organisasi*. Bandung : PT Mandar Maju.

Soejadi Edi 1986, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suganda Daan dk. 2001. *Kepemimpinan Dalam Keberagaman Budaya* Jakarta : LAN- RI.

Prof. DR. Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.

Suryaningrat, Bayu. 1992, *Desa Dan Kelurahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syafei Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara 2003.

Taliziduhu Ndraha,1990. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha 1987, *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Dharma Lip

Thoha,Miftah. 20007 *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rajawali press.

Widjaja, H. A. W. 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prof. Dr. J. Winardi, 1999, *Disiplin Pegawai Dalam Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prof. DR Wasistiono, sodu, 2000. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Focus Media.

Willson Jess. 1992. *Memelihara Girah Kerja*. Jakarta : PT. Jakarta. Bumi Aksara,

PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Jakarta : IMPAC

Skripsi

Elita Gusfa Mutari. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*.

Lindasari. 2010. *Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa di Desa Kadur Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis*.

Riza Fitri. 2014. *Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*.